

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhammad. "Hukum dan Penelitian Hukum" Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Ali Chaidir, "Badan Hukum." Bandung: PT Alumni, 2014.
- Anna Maria Tri Anggraini, "Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat: *Per Se Illegal* Dan *Rule Of Reason*", Pusat Studi Hukum Ekonomi (PSHE), FHUI Depok, 2003.
- Andi Fahmi Lubis, Ningrum Natasya Sirait, "Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks", Published and Printed with Support of Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Oktober 2009
- Arie Siswanto, "Hukum Persaingan Usaha." Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Arifuddin Azwar. "Metode Penelitian." Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Ditha Wiradiputra, "Pengantar Hukum Persaingan Usaha Indonesia." Modul untuk Retooling Program under Employee Graduates at Priority Disiciplines under TPSDP (Technology and Profesional Skills Development Sector Project) DIKTI. 14 September 2004, Jakarta.
- Hermansyah, "Pokok-Pokok Persaingan Usaha di Indonesia." Jakarta: Kencana, 2008.
- I Dewa Gede Atmadja, "Teori-Teori Hukum", Setara Press, 2018.
- I Made Pasek Diantha, "Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum" Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Johnny Ibrahim, "Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif" Malang: Bayu Media Publishing, 2007.
- Lexy. J. Moleong. "Metodologi Penelitian Kualitatif" Bandung: Remaja Rosdakarya. 2000.
- Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008.
- Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum." Jakarta: UI Press. 2008.
- Soerjono Seokanto dan Sri Mahmudji, "Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat" Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 2009.
- Sudarwan Danim. "Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora." Bandung: Remaja Rosdakarya. 2002.
- Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

Peraturan Menteri BUMN PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN dan Perubahannya pada PER-15/MBU/2012 dan PER-08/MBU/12/2019

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Hulu Migas

Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja SKK Migas

Peraturan Di Lingkungan Migas Indonesia

Surat Keputusan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) No KEP-0041 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Kerja Nomor 007 Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 04 beserta Petunjuk Pelaksanaan Tender.

Perubahan kedua atas Surat Keputusan Direksi Pertamina No Kpts-51/C0000/201-S0 tentang Manajemen Pengadaan Barang Jasa yang terdiri dari Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa beserta Tata Kerja Organisasi (TKO) dan Tata Kerja Individual (TKI).

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara No 14/PUU-XVI/2018 Tentang Pengujian UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN Terhadap UUD 1945.

Surat Edaran No 10 Tahun 2020 Tentang Permemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Putusan Perkara Nomor 07-KPPU-I-2013 Tentang Pengadaan jasa E-Pos di Bandara Soekarno Hatta

Putusan Perkara Nomor 02-KPPU-L-2006 Tentang Penunjukan langsung Proyek Logo Pertamina

Karya Ilmiah:

Anna Maria Tri Anggraini, “Sinergi BUMN Dalam Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Dalam Perspektif Persaingan Usaha”, *Mimbar Hukum* Vol 25 No 3, Oktober 2013.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), “Pengkajian Hukum Tentang Privatisasi Perusahaan Milik Negara Ditinjau Dari UUD 1945”. 2009.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), “Analisa Dan Evaluasi Hukum Tentang Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)”. 2009.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), “Analisa Dan Evaluasi Hukum Tentang Badan Usaha Milik Negara (UU No 19 Tahun 2003)”. 2011.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), “Analisa Dan Evaluasi Hukum Mengenai Peningkatan Peran Badan Usaha Milik Negara Sebagai Agen Pembangunan Di Bidang Pangan, Infrastruktur Dan Pembangunan”. 2016.

Dila Kristy Sitepu, “Analisa Hukum Praktek Monopoli Terhadap Kenaikan Harga Gas Industri Oleh PT PGN (Persero) Di Wilayah Sumatera Utara”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* Vol 3 No 3, November 2019.

- Inda Rahadiyan, “Kedudukan BUMN Persero sebagai *Separate Legal Entity* dalam Kaitannya dengan Pemisahan Keuangan Negara pada Permodalan BUMN”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 4 Vol. 20 Oktober 2013.
- Kurnia Toha, “Masa Depan Monopoli Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* No 2 Tahun XXXIV, April-Juni 2004.
- Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*. Volume 01, Nomor 01, Juli 2019
- Monika Suhayati, “Kajian Yuridis Privatisasi Badan Usaha Milik Negara Melalui Mekanisme Penawaran Umum (*Initial Public Offering*)”, *Negara Hukum* Vol 2 No 1, Juni 2011.
- Nur Hadiyati, “Urgensi Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Undang-Undang” *Jurnal Pengadaan*, Vol. 1 No. 2, April 2018 1-9, ISSN 1411-1234.
- R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang“, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2, 2016.
- Wihelmus Jemarut, “Pendekatan *Rule Of Reason* Dan *Per Se Illegal* Dalam Perkara Persaingan Usaha”, *Jurnal Hukum Widya Yuridika* Vol 3, No 2, Desember 2020.
- Zuhro Puspitasari, “Rekonsepsi Pengecualian Monopoli Yang Diselenggarakan Oleh Badan Usaha Milik Negara Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia”, *Jurnal Panorama Hukum* Vol 2 No 2, Desember 2017.

Internet (website):

- Bisnis.com, “KPPU: Sinergi BUMN Harus Berujung Efisiensi”, <https://kabar24.bisnis.com/read/20170122/15/621397/kppu-sinergi-bumn-harus-berujung-efisiensi>, diakses tanggal 19 Desember 2020.
- Hukumonline.com, “KPPU: Holding BUMN Dikecualikan Dari Hukum Persaingan”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57c05106d9d7f/kppu--holding-bumn-dikecualikan-dari-hukum-persaingan/>, diakses tanggal 19 Desember 2020.
- Hukumonline.com, “Kedudukan Peraturan Menteri dalam Hierarki Perundangan”, diakses tanggal 1 Juli 2021.
- Hukumonline.com, “Paradigma Baru Kepastian Hukum Kontrak Kerja Sama Hulu Migas”, diakses tanggal 1 Juli 2021.
- Hukumonline.com, “Memahami Cost Recovery dan Gross Split dalam Kontrak Migas”, diakses tanggal 1 Juli 2021.
- JawaPos.com, “Pelaku Usaha Apresiasi Gebrakan Erick Thohir Dalam Sinergi Swasta – BUMN”, <https://www.jawapos.com/ekonomi/16/12/2019/pelaku-usaha-apresiasi-gebrakan-erick-thohir-dalam-sinergi-swasta-bumn/>, diakses tanggal 19 Desember 2020.

Okezone.com, “Sinergi BUMN Berpotensi Langgar UU Persaingan Usaha”, <https://economy.okezone.com/read/2016/08/21/320/1469218/sinergi-bumn-berpotensi-langgar-uu-persaingan-usaha>, diakses tanggal 19 Desember 2020.

Karya Tercetak Pemerintah:

- Bin Nahadi, “Monopoli Dan Sinergi BUMN”, Materi Webinar Monopoli dan BUMN KPPU, September 2020.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), “Negara Dan Pasar Dalam Bingkai Kebijakan Persaingan”, 2011.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), “Hukum Persaingan Usaha: Buku Teks”, Edisi Kedua 2017.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), “Pedoman Program Kepatuhan Terhadap Undang Undang No 5/1999”, 2016.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), “Pedoman Penggunaan Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha”, 2016.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha, “Penelitian Industri Hulu Migas”, Direktorat Ekonomi Kedepuyan Kajian dan Advokasi, 2019
- Teddy Anggoro, “Monopoli Dan BUMN”, Materi Webinar Monopoli dan BUMN KPPU, September 2020.
- Toto Pranoto, “Monopoli Dan Perlindungan Terhadap Publik”, Materi Webinar Monopoli dan BUMN KPPU, September 2020.

Tesis:

- Yoga Tri Rizaldi, “Implikasi Penunjukkan Langsung Terhadap Persaingan Usaha Dalam Pengadaan Jasa E-POS (*Electronic Point Of Sales*) Di Bandara Udara Soekarno Hatta”, Tesis Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Mirza Satria Buana, Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi, Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010.
- Muhammad Hillmy Yachya Abidin, “Analisis Atas Ketentuan Sinergi BUMN Dalam Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Di Lingkungan PT PLN Persero Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha”, Tesis Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015.
- Prasetyo Bayu Murty, “Kebijakan Sinergi BUMN Dalam Perspektif Kebijakan Dan Ekonomi Persaingan Usaha: Studi Kasus Perusahaan Terpilih Bumn Di Industri Jasa Informasi”, Tesis Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2015.

Sumber lainnya:

- PriceWaterhouseCooper (PwC) Indonesia, “Oil and Gas In Indonesia: Investment and Taxation Guide”, 9th Edition, May 2018.
- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, “Penilaian Kualifikasi Dalam PTK 007 Buku Kedua Revisi 04”, Sosialisasi SOP CIVD Area Sumbagut, Maret 2018.